



Politik Islam Inklusif dalam Perspektif Rached Ghannouchi

Nur Saadah Khudri¹⁾, Mahyudin Ritonga²⁾, Saifullah SA³⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

nursaadahkhudri@gmail.com¹⁾

mahyudinritonga@gmail.com²⁾

saifullah@umsb.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lebih dalam tentang dinamika pemikiran politik Islam di Tunisia yang di pelopori oleh Rached Ghannouchi sebagai pimpinan partai Ennahda, dimana perspektif politik yang ada saat itu lebih bersifat otoriter, sehingga membuat Rached Ghannouchi menawarkan sebuah inovasi baru tentang politik Islam yang lebih inklusif dan akomodatif, yang menjunjung tinggi demokrasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman dalam perpolitikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk jenis penelitian keperustakaan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber buku, jurnal dan artikel ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data temuan dianalisa secara deskriptif yang mencakup analisis literatur tentang pemikiran politik Islam inklusif menurut Rached Ghannouchi sehingga dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa politik Islam inklusif itu terintegrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Islam dan modernisasi bukan suatu yang bertentangan melainkan dapat saling melengkapi untuk menciptakan politik yang inklusif. Ghannouchi menekankan ijtihad dan juga menyoroti tentang bagaimana menghormati dan menyikapi dengan benar terhadap pluralitas yang terjadi pada masyarakat modern, untuk mencegah ekstremisme yang anti terhadap non islam, supaya terjadi stabilitas politik dan hamonisasi di masyarakat melalui politik Islam yang lebih akomodatif dan inklusif.

Kata Kunci: Inklusif, Politik Islam, Rached Ghannouchi

Abstract

This research aims to analyse more deeply the dynamics of Islamic political thought in Tunisia pioneered by Rached Ghannouchi as the leader of the Ennahda party, where the existing political perspective at that time was more authoritarian, thus making Rached Ghannouchi offer a new innovation about Islamic politics that is more inclusive and accommodating, which upholds democracy without leaving Islamic principles in Islamic politics. This research uses qualitative methods in the form of library research by collecting data from various sources of books, journals and scientific articles that have relevance to the research topic. Furthermore, the findings are analyzed descriptively which includes literature analysis on inclusive Islamic political thought according to Rached Ghannouchi so that it can help readers to understand that inclusive Islamic politics is integrated with modern democratic principles. The results of this study explain that Islam and modernization are not contradictory but can complement each other to create an inclusive politics. Ghannouchi emphasizes ijtihad and also highlights how to respect and respond properly to the plurality that occurs in modern societies, to prevent extremism against non-Muslims, so that there is political stability and harmonization in society through a more accommodating and inclusive Islamic politics..

Keywords: Inclusive, Islamic Politics, Rached Ghannouchi

PENDAHULUAN

Politik dalam Islam merupakan suatu yang sangat penting. Islam memandang politik sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan yang mencakup tidak hanya urusan pemerintahan dan kekuasaan, melainkan juga berkaitan dengan moral dan prinsip-prinsip etika yang mengarahkan terhadap tindakan individu dan masyarakat (Latif & Mutawalli, 2023). Secara keseluruhan Islam memandang politik sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan moralitas dalam masyarakat dan selaras dengan tujuan utamanya yaitu kemaslahatan umum yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Yunus, 2017). Dalam hal ini berarti semua tujuan politik dalam Islam diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Namun demikian politik Islam juga tidak mengabaikan hak-hak golongan yang ada diluar Islam (Qodir, 2023). Islam memberikan perlindungan terhadap setiap lapisan masyarakat termasuk non muslim (Bakir, 2023). Pernyataan ini didasarkan pada realita yang telah dicontohkan pada zaman Rasulullah dengan adanya piagam Madinah pada awal pemerintahan Rasulullah di Madinah.

Secara teoritis, penelitian ini dibangun dari konsep tentang politik Islam dan konsep politik yang inklusif. Politik Islam secara kontekstual, baik klasik maupun modern melihat politik Islam sebagai hubungan antara politik, Islam dan negara atau pemerintahan. Sering terjadi perbedaan pandangan tentang hubungan tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya masyarakat muslim. Dan juga hubungan politik, Islam dan negara juga dipengaruhi oleh berbagai hubungan masyarakat dalam suatu negara, baik hubungan antara satu ideologi maupun beda ideologi atau hubungan umat muslim dengan non muslim. Ibnu Taimiyah sendiri menjelaskan bahwa politik Islam tidak terlepas dari bagaimana memahami konsep negara atau pemerintahan yang bertitik berat kepada fungsi negara atau pemerintahan dalam Islam sebagai penegak konstitusi, kooperasi dan baiat (Mahmuddin, 2015; Aly, 2015; Zaman, 2019).

Sedangkan politik Islam yang inklusif pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap masyarakat dalam isu agama sehingga muncul istilah inklusifitas agama, sikap ini ternyata mempengaruhi terhadap paradigma umat muslim terhadap dinamika politik, sosial dan budaya, khususnya pada paradigma politik. Saat ini partai politik islam banyak mempromosikan dirinya sebagai sebuah partai Islam yang inklusif, yang artinya sebuah partai Islam yang mau mengakomodir semua kalangan, partai tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi non muslim juga dapat terlibat dalam partai muslim. Politik Islam inklusif diyakini merupakan sebuah Solusi untuk partai Islam yang tidak ingin terjebak pada narasi politik Barat sembari ingin mempertahankan identitas keislamannya. Salah satu tokoh yang sangat mempengaruhi pandangan politik Islam inklusif secara global adalah Rached Ghannouchi, seorang pemikir dan politisi Tunisia yang berhasil memberikan wajah baru kepada partai yang dipimpinnya yaitu partai Islamis Ennahda (Tamimi, 2001; Barta, 2020; Zulkarnain et al., 2022; Anas, 2023; McCarthy, 2023).

Pandangan politik Ghannouchi pada dasarnya sudah banyak yang membahasnya, terutama tentang hubungan antara Islam dan demokrasi (Fuad et al., 2023), dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Ghannouchi ingin melihat titik temu antara Islam, demokrasi, kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dipengaruhi oleh dinamika kondisi politik di Tunisia dimana waktu itu Ghannouchi ingin menjaga stabilitas politik dan perdamaian di Tunisia, sehingga membuat partai Ennahda setuju untuk berbagi kekuasaan dengan partai Nida Tounis yang berhaluan sekuler. Langkah politik ini dapat meredam konfrontasi antara kelompok Islamis dengan kelompok sekularis. Hal yang menarik lagi dari gerakan langkah politik Ghannouchi ini adalah dia dapat mempertahankan ideologi politik meski dia telah melakukan kompromi dan berbagi kekuasaan di parlemen dengan partai yang berbeda ideologi dengan dirinya. Hal inilah yang menjadi sosok Ghannouchi dihormati oleh kalangan tokoh politik yang ada di negaranya dan juga mempengaruhi paradigma politik para ilmuwan politik Islam, baik secara lokal maupun global (Muhammaddiah & Muhazir, 2021; Rahman et al., 2023).

Namun demikian, ketika memahami bahwa ada sebuah titik temu antara islam, demokrasi, kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat diperlukan sebuah sikap politik yang lebih terbuka dan akomodatif supaya dapat memberikan ruang dialektika diantara perbedaan yang ada ditengah masyarakat yang semakin pluralis dan dinamis, oleh karena sikap politik itu adalah sikap politik inklusif dimana sikap politik inklusif yang di adopsi oleh Rached Ghannouchi ini yang menjadi titik fokus penelitian yang bertujuan untuk lebih mengelaborasi pemikiran dan sikap politik Rached Ghannouchi yang inklusif ini dan melihat bagaimana perkembangannya dan pengaruhnya secara global dan juga ingin menyajikan penjelasan tentang prinsip-prinsip yang dipakai Rached Ghannouchi yang dijadikan landasan pemikirannya.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah tinjauan kepustakaan. Data yang dikumpulkan melalui penelusuran beberapa buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian

(George, 2021; Fleming-May, 2023). Buku dan artikel yang dijadikan sebagai sumber penelitian ialah Karya Ghannouchi dan karya para akademisi yang terkait dengan pemikiran Ghannouchi dalam bidang politik. Dari karya-karya tersebut kemudian ditemukan dengan teknik membaca secara cermat yang kemudian mengambil makna yang berhubungan dengan politik yang digagas oleh Ghannouchi. Kemudian dianalisis secara deskriptif untuk dapat dipahami secara rinci dan menyeluruh tentang pemikiran Rached Ghannouchi terhadap politik Islam inklusif, serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang latar belakang kondisi perpolitikan umat Islam di Tunisia dan perkembangan partai Ennahda yang dipimpin oleh Rached Ghannouchi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Islam Inklusif

Politik Islam merupakan sebuah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktek politik dan pemerintahan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep sekularisme dimana agama terpisah dari persoalan politik dan pemerintahan. Secara historisnya, politik Islam telah melewati perjalanan Panjang, sejak dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Politik Islam telah mengalami dinamika yang cukup kompleks dalam menjawab tantangan perubahan zaman (Knudsen, 2003). Dari yang perkembangan paradigma politik Islam klasik sampai paradigma politik Islam modern (Indra et al., 2023). Ada banyak perdebatan yang sengit antar cendekiawan muslim tentang bagaimana politik Islam itu seharusnya, seiring dengan pesatnya pengaruh pemikiran Barat dikalangan cendekiawan muslim dalam memposisikan antara politik dan Islam, hal ini juga dipicu karena konsep politik Islam itu sendiri tidak dijelaskan secara mendetail dalam al-Quran dan Sunnah (Islam & Islam, 2020). Seperti konsep tentang negara. Sebagian cendekiawan muslim ada yang setuju tentang konsep negara itu dipimpin oleh seorang Khalifah atau disebut negara Khilafah, Sebagian lain ada yang tidak setuju. Ada yang setuju konsep demokrasi ada juga yang tidak setuju dengan konsep demokrasi, dan ada juga yang mencoba mengkombinasikan antara dua prinsip ini, yaitu Islam dan demokrasi (Voll, 2007).

Dalam perkembangannya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, era pemerintahan Abbasiyah, Umayyah sampai terbentuknya Kerajaan-kerjaan lokal waktu itu, politik Islam sudah berhasil membentuk sebuah paradigma dimana politik islam dapat menjaga kestabilan negara. Namun setelah abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan munculnya semangat kolonialisme Eropa, maka sistem politik Islam mulai mendapatkan tantangan baru dengan banyaknya negara Islam jatuh ketangan kolonial Eropa. Hal ini juga mempengaruhi cara pandang terhadap politik Islam itu sendiri terutama dikalangan ilmuwan politik Islam maupun dikalangan para pemimpin-pemimpin partai politik Islam. Seperti yang terjadi di Kerajaan Turki Ustmani, dimana pada masa kejayaan Kerajaan Turki Utsmani, kekuatan politik Islam sangat menonjol, penerapan prinsip-prinsip Islam sangat ketat, tetapi setelah Kerajaan Turki Utsmani runtuh, haluan politik Turki mulai berubah. Perubahan itu mendapatkan sorotan dikalangan ilmuan politik Islam, yang melahirkan paradigma baru terhadap pemaknaan tentang konsep politik Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, munculnya para pemikir politik Islam modern, seperti Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, Sayid Qutb, Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kondisi umat Islam pasca runtuhnya kerajaan Islam setelah abad ke-19 sangat tergantung kepada non Islam terutama bidang ilmu dan teknologi (Butarbutar, Damanik, & Marzuki Manurung, 2022). Kondisi ini membagi paradigma terhadap pengaruh Barat terhadap ideologi Islam. *Pertama*, dikalangan tradisional yang ingin mengembalikan prinsip-prinsip kenegaraan dan politik Kembali ke masa Khulafa Al-Rasyidin. Bukan berarti paradigm ini menolak pemikiran Barat, namun lebih memprioritas prinsip-prinsip Islam dalam membangun sistem pemerintahan dan politik, seperti yang dikembangkan oleh pemikir Rasyid Ridha. *Kedua*, paradigma dimana Islam lebih akomodatif terhadap pemikiran Barat, baik dengan cara islamisasi pemikiran Barat atau justifikasi dari nilai-nilai Islam. Seperti yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh. *Ketiga* adalah para pemikir fundamentalis dimana mereka lebih cenderung menolak secara keras terhadap pemikiran Barat. Mereka menganggap bahwa pemikiran Barat sangat bertolak belakang dengan sistem politik, sosial dan budaya Islam, sehingga mereka membuat sistem politik sendiri, seperti yang dikembangkan oleh Sayid Qutb dan al Maududi.

Sedangkan (Hasbi, 2011) menjelaskan bahwa klasifikasi pemikir Islam terhadap perkembangan politik Islam sejalan dengan pemikiran yang telah disampaikan oleh (Butarbutar, Damanik, & Marzuki, 2022), namun ada penambahan paradigma bahwa politik Islam bersifat sekular dimana Islam dan negara harus dipisahkan karena paradigm ini memandang bahwa agama Islam tidak mengatur hal-hal yang bersifat duniawi termasuk hubungan sosial, politik dan budaya seperti sekularisme yang terjadi di Barat. Tokohnya seperti Ali Abdurrazid dan Thaha Husein. Menurut dia perbedaan sikap ini merupakan sebuah respon terhadap isu-isu politik modern yang dikembangkan oleh pemikiran Barat yang berkaitan dengan konsep nasionalisme, demokrasi, liberalism, pluralism dan prinsip-prinsip lain yang berkaitan dengan kebebasan,

persamaan hak dan lain sebagainya.

Lain hal dengan pandangan politik Shihab, seorang cendekiawan muslim Indonesia. Shihab pandangan bahwa politik Islam merupakan sesuatu yang tidak harus dipertentangkan antara politik dan Islam. Politik merupakan sesuatu yang terintegrasi terhadap Islam, namun melihat politik Islam harus secara realistis dimana dalam prakteknya sering terjadi mencampurkan antara urusan politik dan agama untuk mencapai suatu kepentingan, hal ini mengakibatkan terjadi kerusakan terhadap substantif peran agama dan politik itu sendiri dan juga dapat merusak keimanan umat Islam (Salim, 2016; Fikri et al., 2024). Padahal nilai-nilai ajaran Islam dapat menopang kegiatan politik untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat secara luas. Shihab juga menekankan bahwa sikap toleransi dan pluralisme dalam kegiatan politik Islam dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif dalam masyarakat (Muhammaddiah, 2022; Fikri et al., 2024).

Dengan menganalisa dengan beberapa pandangan tentang dinamika politik Islam, perlu disadari bahwa dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin dinamis dan plural ini, paradigma politik Islam juga harus melakukan adaptasi, yang bukan berarti kita mengabaikan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan nilai dan ideologis dalam berpolitik dan bernegara, namun juga harus mempertimbangkan bahwa politik Islam itu dapat menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat sehingga kestabilan politik, kesejahteraan masyarakat tercipta, bukan terjadi sebaliknya, yaitu peperangan dan perpecahan antar umat beragama, dan itu sangat merugikan paradigma politik Islam. Pandangan yang terbuka tentang politik Islam pada dasarnya sudah banyak dipraktekkan dibelahan dunia Islam.

Latar Belakang Gerakan Politik Rached Ghannouchi

Rached Ghannouchi seorang tokoh Tunisia yang lahir pada tahun 1941 bulan juni di el-Hamma Tunisia Selatan. Ghannouchi pernah belajar di Universitas Kairo Mesir jurusan pertanian, dimana sebelumnya Ghannouchi menyelesaikan kuliahnya di Universitas ez-Zitouna pada tahun 1962. Ketika Ghannouchi sedang belajar di Universitas Kairo terjadi ketegangan politik antara presiden Tunisia (Habib Bourguiba dengan presiden Mesir (Jamal Abdul Naser). Akibat dari ketegangan politik dua negara tersebut, pelajar Tunisia diberhentikan dari Universitas Kairo. Meskipun demikian, hal itu tidak mematahkan semangat Ghannouchi muda dalam menuntut ilmu. Ghannouchi melanjutkan Pendidikannya ke Suriah di Universitas Damaskus. Di Universitas Damaskus ini Ghannouchi belajar tentang filsafat dan mulai tertarik tentang politik dengan bergabung dalam kegiatan-kegiatan politik (Kamis et al., 2021). Tidak cukup di Damaskus, Ghannouchi melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne Paris sehingga Ghannouchi mendapatkan pemikiran Barat. Selama setahun di Paris, Ghannouchi kembali ke Tunisia, kemudian mendirikan organisasi dengan tujuan untuk melakukan reformasi di negaranya.

Dengan latar belakang Pendidikan yang demikian, dan keinginannya terhadap terjadinya perubahan di negaranya, Ghannouchi yang agamis mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan The Movement of Islamic Tendency pada tahun 1981. Organisasi ini merupakan embrio dari berdirinya partai Ennahda. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Tunisia dimana pada tahun 1978, terjadi penindasan terhadap kaum sipil yang berkerja sebagai buruh pekerja dan petani, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran waktu itu yang memakan ratusan korban. Dengan adanya peristiwa besar ini, membuat Ghannouchi Bersama teman-temannya mengkritik pemerintahan. Ghannouchi melihat bahwa otoritas politik saat itu, lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan agama yang melahirkan sikap ketidakadilan dan kekerasan terhadap masyarakat. Dengan organisasi The Movement of Islamic Tendency, ingin memperbaiki pandangan tentang perbedaan agama dan ketidakadilan yang terjadi dengan memunculkan diskursus tentang tidak hanya tentang iman, tetapi juga tentang aspek kemanusiaan, sosial, politik dan kesejahteraan masyarakat (Bartal, 2020).

Tidak cukup dengan gerakan organisasi dan pendirian partai Ennahda, Ghannouchi dan beberapa kader partai memperdalam pemikirannya tentang politik Islam, terutama tentang masyarakat dan peradaban (Ben Lazreg, 2021). Salah satu tokoh yang mempengaruhi pemikiran Ghannouchi adalah Malek Bennabi. Malek Bennabi membuat pertemuan rutin yang membahas tentang pikiran Islam, pemikiran Bennabi sendiri dipengaruhi oleh Ibnu Khaldun. Menurut Ghannouchi, Bennabi telah memberikan pandangan yang berbeda tentang Islam kontemporer dan visi peradaban Islam (Tamimi, 2001). Bennabi lebih memberikan pandangan tentang isu-isu seperti isu perempuan dan Islam, ekonomi dalam Islam, pemerintahan dalam konteks modernitas, keadilan, penindasan, demokrasi, kediktatoran, yang menariknya, Bennabi melihat isu-isu itu tidak dari sudut agama. Hal ini juga yang membuat perbedaan dengan pemikir Islam modern lainnya seperti Sayid Qutb menurut Ghannouchi.

Selain pengaruh Bennabi, pemikiran Ghannouchi juga dipengaruhi oleh interaksi dan diskusinya

dengan pemikiran kiri. Dimana isu yang paling disoroti tentang kemiskinan, imperialis yang mengeksploitasi masyarakat lokal, terjadinya konflik antar kelas yang berbeda, tidak hanya mempersoalkan masalah teologis antara Islam dan komunisme, tetapi lebih terkait dengan isu-isu yang terjadi secara realistis pada masyarakat Tunisia saat itu. Dengan pengaruh pemikiran tersebut, Ghannouchi memahami dalam politik Islam bahwa politik Islam bukannya sekedar pembahasan soal hubungan politik dan Islam, tetapi jauh lebih luas dari hal-hal demikian, sehingga dapat memberikan Solusi yang realistis terhadap persoalan sosial, budaya, ekonomi dan pemerintahan di masyarakat. Dengan cara pandang ini yang membuat Ghannouchi dikenal sebagai pemimpin politik Islam Tunisia yang sangat inspiratif baik secara lokal maupun internasional karena Ghannouchi menghubungkan isu-isu yang terjadi ditengah masyarakat islam Tunisia dengan paradigma modernasi, secular, dan demokrasi. Hal ini juga Ghannouchi memberikan landasan ideologis terhadap gerakan partai Ennahda yang dipimpinnya (Muhammaddiah & Muhazir, 2021)

Partai Ennahda dengan pimpinannya Ghannouchi semakin dikenal dengan partai revolusioner diperkuat dengan terjadinya Revolusi Jasmine tahun 2010, yang memulai Musim Semi Arab (Arab Spring) di seluruh Timur Tengah, itu mengubah makna hidup Tunisia. Namun, jalan itu sulit. Tunisia juga terpengaruh oleh gerakan kontrarevolusi yang terjadi terutama di Mesir. Ennahda percaya bahwa revolusi adalah hadiah dan tanggung jawab bagi semua orang Tunisia. Untuk mencapainya, dia percaya bahwa Tunisia harus bersatu. Oleh karena itu, mempertahankan kesatuan nasional adalah hal yang paling penting. Menurut Lynch, Ennahda menyadari luasnya kekacauan yang disebabkan oleh pemerintahan diktator (Habib Bourguiba dan Zinel Abiden Ben Ali) dan pemerintahan kolonial Prancis sebelumnya (Malik & Shukri, 2018). Untuk menghadapi rezim diktator tersebut, Ennahda lebih memilih strategi politik yang moderasi, yaitu dengan kebijakan politik inklusif selama transisi demokrasi, khususnya dalam menjalankan pemerintahan Tunisia. Dalam konteks transisi demokrasi ini, moderasi dimaknai sebagai sebuah sikap penerimaan terhadap system demokrasi, menghargai kebebasan, mendukung secara formal terbentuknya masyarakat madani (Hasemi et al., 2021). Langkah moderasi diri ini berhasil dilakukan sebelum peristiwa pemberontakan Arab pada tahun 2010.

Tindakan lain dari Ennahda dalam menghadapi dinamika politik saat itu adalah dengan menunjukkan komitmennya untuk memastikan kesatuan dan demokrasi di Tunisia. Ennahda memenangkan mayoritas suara setelah pemilihan umum pertama yang demokratis, tetapi dia menolak untuk mengakui dirinya sebagai pemenang. Sebaliknya, Ennahda membentuk koalisi "Troika" dengan al Takattol, atau partai démocratique pour le travail et les libertés (FTDL), yang dipimpin oleh Mustapha Ben Jaafar, dan partai al Mukhtar, atau Kongres untuk Republik (CPR), yang kemudian terpilih sebagai presiden Tunisia pertama dalam periode pasca-revolusi pada 12 Desember 2011. Ennahda tetap memanfaatkan kekuatan yang dibagikan dengan mereka meskipun fakta bahwa CPR mendapatkan 29 kursi dan FTDL hanya mendapatkan 20 kursi (Malik & Shukri, 2018).

Perlu juga digaris bawahi, dalam perjalanan politik partai Ennahda juga mengalami tantangan, dimana Ketika partai ini tetap mempertahannya corak keislamannya, dimana dalam salah satu kebijakannya yaitu berkerjasama dengan kelompok salafi dan memberikan lisensi terhadap organisasi salafi, hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap kelompok secular dimana mereka berfikir bahwa Ennahda ini membuat sebuah gerakan mengislamisasi masyarakat Tunisia. Kecurigaan ini menimbulkan ketidaknyamanan politik dan keamanan negara. Karena kelompok secular cenderung menentang pemerintahan Ennahda yang berkaitan dengan Islam. hal ini juga dibuktikan terjadinya insiden yang melibatkan terbunuhnya dua politisi oposisi. Kondisi ini memicu terjadinya ketidakstabilan politik dan ketegangan hubungan antara partai Ennahda dan oposisi (ANNE WOLF, 2017).

Setelah tahun 2012, Partai Ennahda tidak dipercayai oleh masyarakat dengan ditandai oleh partai Ennahda tidak masuk kepusat kekuasaan di Tunisia, hal ini membuat Ghannouchi dan partainya mulai mengevaluasi diri, dimana ada suatu hal yang digaris bawahi oleh Ghannouchi tentang partai Ennahda selama ini gerakan politiknya terfokus kepada "Islam Politik" yang identik dengan politik identitas. Menurut Ghannouchi Islam politik dan politik identitas bukan suatu pandangan yang ideal lagi itu saat ini, oleh karena itu Ghannouchi merubah haluan politiknya kepada "democrat muslim" yang menitik beratkan bahwa partai Ennahda melindungi hak konstitusi kelompok non muslim dan sekalipun kepada kelompok Atheis. Dan Ennahda lebih bersikap lebih moderat terhadap kelompok fundamental muslim (Hasemi et al., 2021).

Landasan dan Prinsip Paradigma Politik Islam Inklusif Rached Ghannouchi

Politik Islam inklusif yang dibangun oleh Ghannouchi tidak terlepas dari konsep pendekatan politik Ghannouchi yang dilandasi oleh Maqasid Syari'ah, kontekstualisasi pemikiran Islam, martabat manusia (*Karamah Insaniyyah*), dan *ijtihad* (argumentasi). Oleh karena itu, apapun putusan partai yang akan diambil, harus berlandaskan konsep tersebut. Pada awalnya konsep *maqasid syari'ah* ini dikembangkan oleh

pemikir muslim dari wilayah Arab bagian Barat atau Afrika Utara yang Bernama Abu Ishaq al-Syatibi. Di antara karyanya yang fundamental adalah *al-Muwafaqat*. Hal yang paling penting dalam konsep *maqasid syari'ah* yang dikembangkan oleh Syatibi adalah pelaksanaan hukum-hukum yang telah ditetapkan tidak bisa terlepas dari tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat, dan itu bersifat dogmatis sebagai perintah dari Tuhan, artinya politik islam itu tidak bisa terlepas dari konsep teologisnya. (Kurniawan & Hudafi, 2021) Cara pandang Syatibi tersebut mempengaruhi dalam perumusan landasan pergerakan dan kebijakan partai Ennahda dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Seorang ilmuwan Tunisia terkenal dalam Ushul al-Fiqh, Syeikh Tahir Ibn Ashur, kemudian menjelaskan teori *maqasyid* dan menerjemahkannya ke dalam konteks kontemporer. Setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh Muslim harus memenuhi tujuan tertinggi dari Syari'ah, yang ditunjukkan dalam pemeliharaan dan promosi lima kualitas utama dalam kehidupan manusia: kehidupan (dan kualitas hidup), agama atau keyakinan, pikiran atau intelektual, kekayaan, dan keturunan. Ibn Ashur juga menyatakan tiga sifat lain: kebebasan (*al-Hurriyyah*), keadilan (*al-'Adalah*), dan kesetaraan (*al-Musawah*). Menurut Ghannouchi, apapun yang dilakukan Ennahda sejalan dengan visi ini. Agar pendekatan *maqasyid* ini tertanam dalam pendekatan partai, Ennahda harus mematuhi aturan proses bertahap (*sunnah al-tadarruj*) dan aturan prioritas (*fiqh al-Awlawiyat*) yang khas dari teori moderasi-integrasi (Malik & Shukri, 2018).

Namun disisi lain, Ennahda tidak mau menjadikan Tunisia sebagai republic Islam dan tidak juga menerapkan hukum criminal tertentu. Ennahda percaya bahwa memelihara kebebasan dan keadilan adalah menjadi prioritas utama. Ghannouchi selalu memastikan bahwa Ennahda selalu dengan tegus mematuhi prinsip-prinsip kebebasan politik, kebebasan berbicara. Kebebasan ide dan semua nilai-nilai yang membentuk negara yang beradap, karena negara Tunisia tidak hanya milik Umat Muslim, tetapi Tunisia untuk semua orang Tunisia baik muslim maupun non muslim. Ghannouchi juga menekankan bahwa model demokrasi Islam tidak akan terbatas pada pemberian manusia dengan hak-hak politik atau sosial tetapi akan memberkati dia dengan nilai dimana elemen ilahi dalam diri manusia dipertimbangkan dan tidak hanya aspek manusia atau sosial seperti dalam model lain (Malik & Shukri, 2018).

Selain *maqasid syari'ah* konsep utama yang menjadi konsentrasi dari pemikiran Ghannouchi adalah tentang demokrasi. Bagi Ghannouchi demokrasi adalah sesuatu system yang sesuai dengan Islam dan bahwa orang Muslim harus memasukkannya ke dalam pemikiran politik mereka untuk menginstitutionalkan konsep *Syura* atau konsep musyawarah. Ghannouchi menegaskan bahwa yang lebih penting adalah penerapan nilai-nilai demokrasi seperti yang digambarkan oleh Nabi dan para sahabatnya berdasarkan prinsip, bukan model. Dia menyatakan bahwa demokrasi adalah alternatif Barat dari *Syura* Islam, yang telah dilaksanakan sejak era khalifah, ketika pemerintahan islam dipimpin dengan orang yang benar, dimana khalifah disini dipahami sebagai orang yang berfungsi sebagai pengganti Nabi SAW (Malik & Shukri, 2018).

Dengan demikian, Ghannouchi melihat bahwa konsep *syura* dalam Islam sama dengan konsep demokrasi tersebut tanpa melihat landasan ontologis, teologis dan konteks Sejarah dari dua konsep tersebut. Sehingga sebenarnya, paradigma demokrasi yang dikembangkan oleh Ghannouchi ini juga menimbulkan kritikan dari sarjana muslim lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Al-Rab'i. Dia memandang bahwa konsep demokrasi dan *syura* dalam Islam secara terminologi disamakan oleh Ghannouchi padahal menurut Al-Rab'i kedua konsep itu berbeda secara terminologi. Kritik yang muncul ini melihat dari sudut pandang bahwa konsep demokrasi berasal dari Barat dimana terlepas dari unsur teologisnya, sedangkan konsep *syura* itu sendiri tidak terlepas dari konsep teologis yang menjadi akar pembentukannya. Namun demikian banyak sarjana muslim lainnya juga memandang bahwa *syura* sangat selaras dengan konsep Islam dengan sudut pandang yang berbeda baik mencoba lepaskan unsur teologis dalam konsep *syura* dan mengambil jalan Tengah dari antara keduanya (Alisakun, 2020).

Prinsip politik Ghannouchi selain demokrasi, Ghannouchi juga menekankan konsep tentang kewarganegaraan atau muwatanah. Ia menegaskan bahwa pemisahan tradisional antara orang muslim dan non muslim disuatu negara tidak lagi berlaku di negara-negara modern. Oleh karena itu, Ghannouchi menekankan bahwa prinsip-prinsip inti dari Partai Ennahda adalah keterbukaan, demokrasi dan inklusivitas. Dia menolak untuk dikaitkan dengan konservatisme, radikalisme, atau keinginan untuk membangun negara teokratik Tunisia (Malik & Shukri, 2018). Sebaliknya, ia menekankan bahwa negara harus maju melalui pembagian kekuasaan dan kepemimpinan kolektif daripada monopoli atau dominasi kekuasaan oleh setiap partai atau gerakan, yang pada akhirnya akan mengarah pada kediktatoran dan autocracy. Ghannouchi juga menyatakan bahwa diktator bertentangan dengan keinginan rakyat Tunisia dan juga bertentangan dengan Islam.

KESIMPULAN

Politik Islam inklusif yang dipelopori oleh Rached Ghannouchi dari Tunisia tidak bisa terlepas dari bagaimana keadaan perpolitikan domestik yang terjadi di Tunisia. Dengan memakai Ennahda sebagai kendaraan politiknya, Rached Ghannouchi berhasil membentuk sebuah gerakan dan paradigma baru tentang politik Islam yang masih memegang teguh prinsip-prinsip dasar ideologi Islam tanpa memusuhi kelompok yang berbeda dengannya. Sikap politik yang dapat mengakomodir ini kelompok non Islam lebih dikenal dengan politik Islam Inklusif, dimana pada awalnya gerakan politik ini merupakan gerakan dakwah yang berangkat dari keinginan untuk menyebarkan nilai-nilai moral Islam ke publik. Namun seiring berjalannya waktu, Rached Ghannouchi memperluas pemikirannya kepada konsep politik Islam, konsep kewarganegaraan, dan konsep demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat yang semakin pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisakun, S. (2020). Islam and Democracy: A Study on Rachid Ghannouchi's. *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 13(2), 27–54. <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol13no2.2>
- Aly, S. (2015). Kedudukan Agama dan Negara: Perspektif Pemikir Muslim Abad Pertengahan Ibn Taymiyyah. *Ilmu Ushuluddin*, 2(3), 255–276.
- Anas, O. (2023). Rached Ghannouchi and his Political Discourses between Tunisian and Global Islamism. *Sociology of Islam*, 9(3–4), 250–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22131418-09030005>
- ANNE WOLF. (2017). Political Islam in Tunisia the History of Ennahda. In *Oxford University Press*.
- Bakir, A. (2023). Islam and International Relations (IR): why is there no Islamic IR theory? *Third World Quarterly*, 44(1), 22–38. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2121695>
- Bartal, S. (2020). Rached Ghannouchi's test: Political Islam and democracy in Tunisia. *African Studies*, 79(1), 110–124. <https://doi.org/10.1080/00020184.2020.1732190>
- Ben Lazreg, H. (2021). Post-Islamism in Tunisia and Egypt: Contradictory Trajectories. *Religions*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/rel12060408>
- Butarbutar, M. Z., Damanik, K., & Marzuki Manurung. (2022). Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Modern (Sebuah Pembacaan Awal). *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(4), 6–10. <https://doi.org/10.57251/hij.v1i4.451>
- Fikri, M. F., Zulkarnen, & Damanik, N. (2024). Pemikiran Politik Islam M. Quraish Shihab di Indonesia: Sebuah Analisis. *Islam & Contemporary Issues*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.57251/ici.v4i1.1289>
- Fleming-May, R. (2023). *Exploring the Concept of Library Use: A Research Review* (I. Sserwanga, A. Goulding, H. Moulaison-Sandy, J. T. Du, A. L. Soares, V. Hessami, & R. D. Frank (eds.); pp. 189–196). Springer Nature Switzerland.
- Fuad, A. N., Redjosari, S. M., & Rofhani. (2023). From Islamism to Democracy: The Case of Rached Ghannouchi and Ennahda of Tunisia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 17(2), 244–267. <https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/1024/652>
- George, M. W. (2021). *The Elements of Library Research* (Vol. 3, Issue 2). Princeton University Press.
- Hasbi, M. (2011). *Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam*. 45(1).
- Hasemi, A., Hasan, M. N., & ... (2021). Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda di Tunisia Tahun 2016. *E-SOSPOL*, 8(2), 49–61.
- Indra, R., Ritonga, M., & Santosa, F. (2023). Government Control of Islamic Ideology Movement: A Case of Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(1), 129–144. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.11>
- Islam, M. N., & Islam, M. S. (2020). *Islam and Democracy: A Philosophical Debate BT - Islam and Democracy in South Asia: The Case of Bangladesh* (M. N. Islam & M. S. Islam (eds.); pp. 67–101). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42909-6_4
- Kamis, Z. H., Roslan, M., Nor, M., Zulfazdlee, M., Ashari, A. H., Abul, M. Z., & Ashari, H. (2021). Sumbangan Rashid Ghannouchi Dalam Mengharmonikan Antara Islam Dan Demokrasi. *International Journal of West Asian Studies*, 13, 147–159.
- Knudsen, A. (2003). Political Islam in the Middelst East. In *Report - Chr. Michelsen Institute* (Issue 3).
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Latif, M., & Mutawalli, M. (2023). Fiqh of Civilization in Building a Legal State: The Relevance of Muhammad Arkoun's Thought. *AL-AHKAM*, 33(2), 207–230. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643>
- Mahmuddin. (2015). Pemikiran Politik Ibnu Tamiyah. *Jurnal Tahdis*, 6(2), 63–72.
- Malik, M., & Shukri, S. F. M. (2018). From political islam to democrat muslim: A comparison between rashid



- ghannouchi and anwar ibrahim*. *Intellectual Discourse*, 26(1), 161–188.
- McCarthy, R. (2023). Islamism, party change, and strategic conciliation: Evidence from Tunisia. *Party Politics*, 0(July), 1–11. <https://doi.org/10.1177/13540688231192393>
- Muhammaddiah, M. R. (2022). Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3967>
- Muhammaddiah, M. R., & Muhazir. (2021). Islam Demokratis Perspektif Rachid Ghannouchi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 19–36. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3205>
- Qodir, Z. (2023). Post-Islamism and Legal Reform: The Challenges and Future of Political Islam in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 281–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31484>
- Rahman, M. Z. A., Tumin, M., & Abidin, A. Z. (2023). Politik Islam dalam Konteks Tunisia Pasca Revolusi Jasmine: Analisis Pemikiran Rashid Ghannoushi. *Afkar*, 25(2), 499–542. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.15>
- Salim, D. P. (2016). Politik Islam dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159). *Jurnal Aqlam-Journal of Islam and Plurality*, 1(1), 43–52.
- Tamimi, A. S. (2001). *Rachid Ghannouchi: A Democrat Within Islamism* (p. 12). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0195140001.001.0001>
- Voll, J. O. (2007). Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier? *Religion Compass*, 1, 170–178. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2006.00017.x>
- Yunus, M. I. bin M. (2017). Good Governance According To Islamic Perspective. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 200–230.
- Zaman, Q. (2019). Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(2), 111–129. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507>
- Zulkarnain, F., Yahaya, M. A., Sule, B., & Sahid, A. A. (2022). When the East Meets the West: Analysing Rached Ghannouchi's Synthesis of Democracy in Islam. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 127–141. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.10>